

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat, dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan bangsa yang cerdas, agar dapat tercipta sumber daya manusia yang berkualitas, bertanggung jawab, maju serta mandiri yang menjadikan manusia yang seutuhnya baik dari segi sosial, ekonomi, serta budaya.

Pembangunan harus dipahami sebagai proses multidimensi yang mencakup perubahan orientasi dan organisasi sistem sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Tujuan akhir pembangunan adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kemakmuran yang berkaitan dengan aspek ekonomi, dapat diukur dengan tingkat produksi, pengeluaran dan pendapatan. Sedangkan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh aspek nonekonomi, misalnya kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional tersebut dibutuhkan antara lain tersedianya sumber daya manusia yang tangguh, mandiri serta berkualitas. (Soeroso, 2005: 42)

Dalam proses pembangunan manusia atau masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan, akan tetapi berperan penting sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Artinya proses pembangunan harus melibatkan peran aktif masyarakat. Dengan perspektif ini, pembangunan pada saat yang bersamaan harus diarahkan guna memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan, berarti mengarahkan pembangunan untuk memenuhi tujuannya yang paling utama yaitu pemberdayaan. (Ali, 2009: 52)

Untuk mewujudkan pembangunan nasional tidak lepas dari peran pendidikan karena menurut Rellisa, pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan, yang mana sarannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Definisi pendidikan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

“Pendidikan adalah usaha sadar yang dilaksanakan baik oleh pendidikan formal, informal maupun non-formal dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas yaitu sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa.”

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menekankan pada perubahan nilai dan sikap sebagai manusia modern. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk mengentaskan kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan sehingga kelak mereka dapat hidup layak dan mandiri di lingkungan tempat tinggalnya.

Masalah yang dihadapi oleh bangsa ini adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan yang kini semakin ketat. Masalah tersebut menyebabkan kemiskinan yang dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Mengutip laporan terbaru BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2013 mengalami kenaikan sebesar 7,85%, bertambah 0,48 juta orang dibandingkan posisi maret sebanyak 28,07 juta menjadi 28,55 juta jiwa. (Online Wicaksono, 2012)

Salah satu faktor penyebab kemiskinan yang dilatar belakangi oleh pendidikan adalah buta aksara. Yang mana penyandang buta aksara sebagian besar adalah perempuan. Dari tahun ke tahun, jumlah mereka belum mengalami penurunan secara signifikan. Pada 2007, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data yang menunjukkan bahwa perempuan penderita buta aksara sebanyak 12,3% dari 211.063.000 jiwa. Pada 2010, Dirjen Pendidikan Non formal dan Informal (PNFI) Kemendiknas (2010) menyebutkan, jumlah perempuan buta aksara sekitar

65% atau 5,46% dari jumlah total 8,4 juta jiwa. Adapun dari data mutakhir yang dirilis Kemendiknas (2011) diketahui, jumlah perempuan buta aksara masih sekitar 5,3 juta orang dengan usia 15 tahun ke atas. (Online Zahroh, 2011)

Kebanyakan dari mereka bertempat tinggal di kawasan pedesaan miskin yang secara geografis umumnya sulit terjangkau. Hal ini disebabkan karena masyarakat pedesaan mempunyai pandangan yang sudah menjadi budaya bahwa perempuan merupakan makhluk nomor dua. Sehingga berimplikasi kepada sulitnya perempuan mendapatkan akses pendidikan. Kondisi pendidikan yang rendah secara tidak langsung berdampak pada keterampilan dan mata pencaharian perempuan tersebut.

Dalam A'yun (2012), perempuan keluarga miskin di Indonesia cenderung memiliki kesempatan yang terbatas untuk menolong dirinya keluar dari kungkungan kemiskinan. Kesibukan para perempuan dalam urusan domestik sebagai isteri dan ibu yang hanya bertugas mengelola rumah tangga membuat mereka akan sulit mengakses layanan-layanan publik seperti kesehatan, pendidikan sosial, dan budaya. Oleh karena itu, mereka rawan terjerumus ke dalam bentuk eksploitasi seperti kekerasan seksual, prostitusi, buruh migran, kekerasan dalam rumah tangga dan lainnya yang sangat merugikan perempuan.

Pada umumnya mereka mengandalkan pendapatan kepala rumah tangga atau sang suami dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Karena berlatar belakang pendidikan yang rendah dan tidak mempunyai keterampilan, mereka hanya beraktifitas sebagai ibu rumah tangga saja. Maka dari itu perlu adanya program-program pemberdayaan bagi perempuan keluarga miskin.

Tidak dipungkiri bahwa perempuan keluarga miskin adalah para wanita yang sedang tidak berdaya, namun bukan berarti tidak memiliki potensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya bagi perempuan melalui pendidikan menurut Undang-Undang UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pasal 13 ayat 1 dilakukan melalui 3

jalur pendidikan terdiri atas jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. (Undang-Undang Sisdiknas, 2004: 23).

Menurut Hiryanto, agar perempuan tersebut memiliki kemampuan mengembangkan potensinya dalam rangka pemberdayaan masyarakat bagi perempuan pada keluarga miskin maka peran Pendidikan Non Formal sangat strategis. Definisi dan fungsi dari Pendidikan Non Formal sebagaimana yang tercantum di dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 yaitu :

“Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.” (UU. Sisdiknas, 2004 : 23-2)

Menurut Febrisusanto, pendidikan Non Formal timbul dari konsep pendidikan seumur hidup dimana kebutuhan akan pendidikan tidak hanya pada pendidikan persekolahan/pendidikan formal saja. Pelaksanaannya lebih ditekankan kepada pemberian keahlian dan keterampilan dalam suatu bidang tertentu guna pengembangan potensi perempuan pada keluarga miskin dengan menyeimbangkan antara pengetahuan dan keterampilan fungsional.

Dalam memberdayakan perempuan keluarga miskin dilihat dari aspek pendidikan masih perlu pembinaan dan pembimbingan yang memfokuskan pada keterampilan. Agar mereka mempunyai bekal yang dipergunakan untuk mendapatkan kesempatan kerja atau membuka lapangan pekerjaan sendiri.

Kondisi di lapangan, program-program pemberdayaan perempuan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, hasilnya belum banyak terlihat dalam konteks keseluruhan bangsa karena disatu pihak militansi sudah ada tapi dilain pihak mitos-mitos yang meminggirkan kaum perempuan juga belum sepenuhnya hilang dari kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. (Hubeis, 437: 2010)

Keadaan ini terjadi karena desain program sama sekali tidak dibuat untuk mentransportasikan pola relasi gender di dalam rumah tangga dan di masyarakat sehingga tidak berdampak pada posisi perempuan (Holmes et al., 2010 dan Yumna et al., 2010) dan kesetaraan gender. Selain itu, kurangnya pemahaman pengambilan kebijakan terhadap perspektif gender secara utuh sehingga program hanya mampu menjangkau pemberdayaan sebatas peningkatan akses dan partisipasi perempuan dan tidak pada kontrol maupun manfaat yang didapatkan perempuan. Dalam pengambilan keputusan posisi perempuan belum terjadi perubahan secara signifikan karena belum adanya intervensi yang menyeluruh persoalan fundamental terkait aspek kontrol yang mengarah pada perubahan pola relasi gender yang berlaku dimasyarakat. (Online Syukri : 2013)

Bentuk hasil pembelajaran berupa keterampilan yang dilaksanakan masih belum menstrukturisasi budaya dan kebiasaan baru masyarakat serta disesuaikan dengan minat pasar. Selain itu pasca pembelajaran dimana warga belajar yang ingin mengembangkan kemampuan keterampilan yang diperoleh dari mengikuti program mengalami kesulitan sehingga kemampuan keterampilannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan.

Untuk memberikan akses dan kontrol dalam rangka memberdayakan perempuan pada keluarga miskin dibutuhkan suatu wahana atau tempat agar pelaksanaan program berjalan dengan baik. Dengan mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 26 ayat 4 tercantum bahwa satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Sebagai salah satu satuan dalam pendidikan luar sekolah, dalam Auliyaaiz (2013) PKBM dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat dengan menitikberatkan keswadayaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Menurut UNESCO dalam Kamal (2009: 85), definisi PKBM adalah pusat kegiatan belajar masyarakat adalah sebuah lembaga pendidikan yang diselenggarakan di luar

sistem pendidikan formal diarahkan untuk masyarakat pedesaan dan perkotaan dengan dikelola oleh masyarakat itu sendiri serta memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Di lain pihak, PKBM sebagai bentuk peran nyata masyarakat membantu upaya pemerintah dalam bidang pemerataan pendidikan yang diharapkan bisa menjadi pusat informasi bagi masyarakat yang membutuhkan keterampilan fungsional. Programnya pun juga langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan upaya peningkatan mutu hidupnya.

PKBM sebagai penyelenggara program-program Pendidikan Non formal, salah satu program yang diselenggarakan adalah pendidikan keaksaraan. Pendidikan keaksaraan sebagai salah satu program Pendidikan Nonformal untuk membelajarkan warga masyarakat buta aksara, agar memiliki keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung, yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi yang ada dilingkungan sekitarnya, sehingga peserta didik dan masyarakat dapat meningkatkan mutu dan taraf hidupnya. (Online Susiati, 2011)

Kondisi dilapangan menunjukkan bahwa peserta didik pasca mengikuti program pendidikan fungsional kembali menjadi buta aksara atau buta huruf karena kemampuan keaksaraanya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan. Sehingga tidak mempengaruhi dalam pengurangan jumlah buta huruf di Indonesia.

Pada pelaksanaannya program keaksaraan fungsional dengan penguatan keterampilan merupakan pendekatan pemberantasan buta aksara yang menitikberatkan pada proses dari, oleh dan untuk peserta didik dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan membaca dan menulis dan berhitung yang dipadukan dengan praktek ketrampilan yang segera dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu pendidikan keaksaraan diharapkan menjadi lebih efektif digunakan untuk memberantas ketunaaksaraan masyarakat khususnya bagi perempuan pada keluarga miskin dengan mengintegrasikannya dengan ketrampilan fungsional sesuai kebutuhan peserta didik. Dengan modal pendidikan ketrampilan fungsional yang diperoleh diharapkan dapat memotivasi peserta didik untuk mengikuti program keaksaraan hingga tuntas dan tidak kembali menjadi buta aksara kembali.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal pada tahun 2010, mengembangkan salah satu program pendidikan keaksaraan yaitu keaksaraan usaha mandiri (KUM).

Keaksaraan usaha mandiri merupakan salah satu cakupan pendidikan keaksaraan sebagai upaya penguatan keberaksaraan melalui pembelajaran keterampilan atau usaha yang dapat meningkatkan penghasilan dan produktivitas seseorang atau kelompok.

Menurut Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Yulaelawati, (2012) bahwa:

“Keaksaraan usaha mandiri merupakan program melestarikan keaksaraan dengan memberdayakan masyarakat melalui kewirausahaan. Para peserta didik akan mempelajari keterampilan yang sesuai dengan potensi daerah mereka. Dengan demikian mereka bisa memelihara keberaksaraan sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi.”

Sekitar 90 persen penduduk buta aksara berusia produktif dan berada di kalangan ekonomi lemah. Oleh karena itu keaksaraan usaha mandiri (KUM) menjadi prioritas dalam program keaksaraan lanjutan tahun 2012. Program ini dapat mengentaskan buta aksara sekaligus kemiskinan. Langkah ini diambil Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat karena penyandang buta aksara biasanya berpenghasilan rendah atau pengangguran, padahal dari 8,3 juta penduduk buta aksara 7, 5 juta di antaranya berada di rentang usia 15-59 tahun

yang artinya berada di usia produktif. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2012)

Program keaksaraan usaha mandiri diprioritaskan untuk perempuan karena buta aksara didominasi oleh kaum perempuan karena ketahanan ekonomi keluarga banyak terkait dengan pemberdayaan perempuan. Terutama bagi perempuan keluarga miskin yang rentan terhadap masalah sosial dengan melalui program keaksaraan usaha mandiri ini mampu meningkatkan taraf hidup keluarga serta meningkatnya partisipasi termasuk kelompok perempuan dalam proses pembangunan.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih kuatnya budaya patriarki yang menyebabkan terbatasnya perempuan pada layanan-layanan publik seperti pendidikan sehingga perempuan tidak menjadi prioritas dalam pemberdayaan masyarakat
2. Masih rendahnya kemampuan keberaksaraan dan keterampilan yang dimiliki oleh perempuan pada keluarga miskin sehingga mereka tidak bisa melepaskan diri dari belenggu keterbelakangan atau kemiskinan
3. Kurang efektifnya program pemberdayaan perempuan menyebabkan pasca mengikuti program pendidikan keaksaraan kembali buta aksara karena kemampuan aksaranya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan
4. Program pendidikan keaksaraan yang diselenggarakan hanya menekankan agar warga belajar mempunyai kemampuan calistung tetapi bagaimana agar warga belajar memiliki kemampuan pada aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri

### **C. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Karena terlalu luasnya permasalahan dari hasil identifikasi di atas, maka tidak semua akan dibahas. Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam maka



permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, dengan dibatasi pada program keaksaraan usaha mandiri yang diselenggarakan oleh PKBM Albir Salam Kel. Sukaratu Kec. Majasari Kab. Pandeglang.

Berkaitan dengan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian mengenai keaksaraan usaha mandiri dalam pemberdayaan perempuan pada keluarga miskin di PKBM Albir Salam adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik perempuan pada keluarga miskin yang mengikuti program keaksaraan usaha mandiri dalam pemberdayaan perempuan?
2. Bagaimana strategi pemberdayaan yang diterapkan dalam program keaksaraan usaha mandiri dalam pemberdayaan perempuan pada keluarga miskin?
3. Bagaimana capaian kesejahteraan keluarga dari peserta program keaksaraan usaha mandiri dalam pemberdayaan perempuan pada keluarga miskin?

#### **D. Tujuan Penelitian**

##### 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui secara jelas pemberdayaan perempuan melalui program keaksaraan usaha mandiri pada keluarga miskin dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga di PKBM Albir Salam.

##### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui karakteristik perempuan pada keluarga miskin yang mengikuti program keaksaraan usaha mandiri dalam pemberdayaan perempuan.
- b. Untuk mengetahui strategi pemberdayaan yang dilakukan dalam program keaksaraan usaha mandiri dalam pemberdayaan perempuan pada keluarga miskin.

- c. Untuk mengetahui capaian kesejahteraan keluarga dari peserta program keaksaraan usaha mandiri dalam pemberdayaan perempuan pada keluarga miskin.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritik
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menunjang pengembangan teori tentang pemberdayaan perempuan khususnya keaksaraan usaha mandiri
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang telah ada
2. Secara Praktis
  - a. Bagi penyelenggara program temuan ini dapat dijadikan umpan balik untuk pengembangan lebih lanjut yang berhubungan dengan penyelenggaraan program keaksaraan usaha mandiri dalam pemberdayaan perempuan pada keluarga miskin
  - b. Bagi aparat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat, temuan ini dapat dijadikan alternatif program dalam melakukan pembinaan kepada perempuan keluarga miskin sehingga dapat memberikan layanan pendidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhan
  - c. Bagi peneliti lain diharapkan dapat mengkaji lebih dalam tentang pengembangan pemberdayaan perempuan pada keluarga miskin diberbagai sektor kehidupan selain bidang pemanfaatan ekonomi keluarga melalui layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri

#### **F. Struktur Organisasi Tesis**

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan selanjutnya, maka berikut ini sistematika penulisan yang digunakan pada penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut (Pedoman penulisan karya ilmiah UPI, 2013: 20) :

**BAB I.** Cakupan pada bab I berisi tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II.** Cakupan pada bab II berisi tentang landasan teoritis atau kajian teoritis yaitu konsep yang berhubungan dengan judul yaitu konsep kemiskinan, hakikat pemberdayaan perempuan, hakikat keaksaraan usaha mandiri, hakikat kesejahteraan keluarga dan program keaksaraan usaha mandiri merupakan program pendidikan luar sekolah. Bab II juga mencakup mengenai kerangka berpikir.

**BAB III.** Cakupan pada bab III berisi tentang metode penelitian yaitu membahas mengenai pendekatan dan metode penelitian, subyek penelitian, definisi operasional, teknik dan analisi pengumpulan data, langkah-langkah pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan serta proses validitas data.

**BAB IV.** Cakupan pada bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu menjabarkan mengenai profil lokasi penelitian dan profil penyelenggara program, serta deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian mengenai program keaksaraan usaha mandiri dalam pemberdayaan perempuan pada keluarga miskin.

**BAB V.** Cakupan pada bab V berisi tentang simpulan dan rekomendasi sehubungan dengan permasalahan penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA.** Cakupan pada daftar pustaka berisi tentang sumber-sumber literatur yang digunakan dalam penelitian.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN.** Cakupan pada lampiran-lampiran berisi tentang kumpulan dari kisi-kisi, instrumen penelitian yang digunakan serta biodata penulis.